BAB IV

NAHDLATUL ULAMA KEMBALI KE KHITTAH 1926

A. Pengertian.

Salah satu langkah hasil muktamar Nahdlatul Ulama ke XXVII pada tanggal 15-19 Rabiul Awwal 1405 H bertepatan dengan tanggal 8-12 Desember 1984 M. di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Sukorejo,Asembagus, Situbondo, Jawa Timur adalah penetapan kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926. Langkah dan kebijaksanaan yang diambil itu tidak lain adalah merupakan suatu harapan masa depan bagi organisasi ini, agar nantinya dapat berkembang dengan bebas.

Untuk lebih jelasnya akan diberikan pengertian yang menyangkut arti kata tersebut baik secara etimologi (bahasa) maupun secara terminologi (istilah) sebagai berikut :

Khittah menurut etimologi berarti sistem atau cara,[1] sedang khit tah menurut terminologi mempunyai arti bahwa Nahdlatul Ulama kembali sebagai jam'iyah yakni kembalinya eksistensi Nahdlatul Ulama (NU) dari organisasi politik kedalam bentuk organisasi sosial keagamaan, yang tentunya menghentikan segala aktifitas politik praktis dan menghidupkan kembali kegiatan sosial,pendidikan dan dakwah.[2]

Jadi tugas utama Nahdlatul Ulama(NU)hanyalah mengurusi masalah sosial,pendidikan dan penyebaran agama Islam, Dengan demikian penghayatan makna seruan kembali kepada jiwa 1926, berarti penghayatan akan hakekat sebenarnya dari Nahdlatul Ulama sebagaisebuah gerakan sosial keagamaan;ini berarti pula penghayatan

---

[1]Husein Al Habsyi, Kamus Al Kautsar Arab - Indonesia,PP Assegaff, PP Alawy,Surabaya,1977,hal.83.

[2]Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama; Jatayu, Sala, Cet I, 1985, hal, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya menopang Nahdlatul Ulama sendiri, seperti peranan ulama sebagai pengarah dan pengikat persatuan umat. Sedang ajaran Ahlus - sunnah Waljama'ah sebagai asas perjuangan dipandang mampu mempersatukan dan memberikan motivasi bagi langkah-langkah perjuangan secara organisasi dengan asas musyawarah dalam menentukan keputusan dan asas keikhlasan.[3]

B. Latar Belakang, Faktor Dan Tujuan.

1. Latar belakang.

Setelah K.H. Bisri Syansuri pulang ke rahmatullah, peristiwa politik dalam Nahdlatul Ulama dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghiasi lembaran sejarah partai ini, sehingga keretakan yang memang ada mulai nampak. Satu demi satu peristiwa mengakibatkan Nahdlatul Ulama (NU) mengalami kekacauan baik itu ekstern maupun in - ternya. Peristiwa-peristiwa tersebut seakan-akan terus menjalar, sehingga tidak terlihat adanya penyelesaian yang tuntas. Misalnya pada bulan Agustus tahun 1980 terjadi perebutan jabatan " Ketua komisi VIII " di DPR RI. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1981 terjadi keributan masalah daftar nama calon anggota DPR kepada lembaga pemilihan umum Indonesia (LPUI) yang diprotes oleh unsur Nahdlatul Ulama, karena tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ditambah lagi dengan protes dari partai muslimin Indonesia mengenai perimbangan - kursi di DPR. Unsur partai Muslimin Indonesia menghendaki perimbangan yang wajar tanpa berpedoman pada " Konsensus Munas 1975 ". Dengan kata lain

---

[3]Pengurus Besar NU, Program Dasar Pengembangan - Lima Tahun Nahdlatul Ulama, Keputusan Muktamar NU Ke 26 Jakarta, 1980, hal. 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai Muslimin Indonesia (MI) menghendaki pembagian kursi untuk eks partai Islam lebih banyak dari kursi NU,[4] Hal ini membuktikan berkurangnya kewibawaan NU di antara partai patnernya.

Sebagaiterganisasi sosial keagamaan sebenarnya NU telah mampu menunjukkan ciri yang amat menonjol. Terutama dengan bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh jam'iyahnya, sehingga Nahdlatul Ulama mampu mengikat anggautanya menjadi himpunan kekuatan sosial yang mantap, tangguh dan konsyal di tengah masyarakat. Dengan begitu secara kultural amalan keagamaan telah dipegangi oleh NU-namun demikian secara tidak disadari NU telah terjebak pada sikap yang kurang peka dalam menanggapi perkembangan keadaan. Salah satu sebabnya adalah tekanan terlebihan pada bidang sosial politik selama ini, terutama setelah Nahdlatul Ulama menjeburkan diri kedalam Partai Persatuan Pembangunan, maka akibatnya adalah NU menjadi ketinggalan untuk ikut serta beramal nyata sebagaimana yang dituntut dalam era pembangunan dewasa ini. Padahal kelahiran NU sebenarnya mempunyai maksud tertentu sebagai yg tercantum dalam " Statuten '26 ". Dalam Statuten ini disebutkan keinginannya untuk menghimpun para ulama yang berhaluan Ahlussunnah Waljama'ah sekaligus dibarengi oleh berbagai ikhtiar yang nyata, pengembangan pendidikan dan dakwah serta santunan kepada fakir miskin dan lain-lain,[5] sehingga timbul sementara pendapat yang menyatakan bahwa untuk merubah orientasi dan menemukan kembali identitas-

---

[4]Choirul Anam, Op. cit, hal. 279.

[5]Keputusan Muktamar ke 27 Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah 1926, Risalah, Bandung, 1985, hal. 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU ; maka NU harus keluar sama sekali dari kegiatan politik, dalam hal ini sudah barang tentu keluar dari PPP. Dengan demikian terbukti kemungkinan melakukan purifikasi (pemurnian) jam'iyah Nahdlatul Ulama.[6] Oleh karena itulah dirasakan pentingnya mewujudkan pola pembenahan sekaligus pengembangan organisasi Nahdlatul Ulama.

Uraian tersebut di atas itulah yang melatar belakangi kembalinya NU ke khittah 1926 dan sekaligus berarti kembali sebagai jam'iyah yang sudah barang tentu akan menghidupkan kembali kegiatan sosial kemasyarakatannya demi kepentingan umat Islam khususnya ; bangsa dan negara pada umumnya.

2. Faktor.

Faktor-faktor yang menyebabkan Nahdaltul Ulama kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi/ jam'iyah sosial keggamaan antara lain adalah :

a. Faktor agama.
b. Faktor politik.
c. Faktor sosial budaya.

a.1. Faktor agama.

Karena NahdlatuliUlama adalah organisasi keagamaan, maka tentunya bidang agama inilah yang menjadi landasan yang kuat baginya, sehingga akhirnya dapat dikembangkan ke bidang-bidang yang lain ; dari bidang pendidikan dan kesenian, hingga ke bidang sosial, politik dan ekonomi. Di balik ini semua ternyata di dalam tubuh Nahdlatul Ulama yang

---

[6]Slamet Effendy Yusuf dkk, Dinamika Kaum Santri, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hal. 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini terjun di arena politik praktis, dengan selalu mementingkan masalah politik, maka faktor dakwah yang seharusnya merupa - kan missi Nahdlatul Ulama menjadi terbengke lai. Dan sejak itu pula Nahdlatul Ulama di- anggap mengalami kemunduran peran di segala bidang, terutama di bidang agama. Sebagai - mana K.H. Machrus Ali, seorang ulama berpe- ngaruh dari Jawa Timur, menyebut bahwa te- lah terjadi kerusakan bathiniyah yang parah dalam kalangan Nahdlatul Ulama dan para to- kohnya dianggap terlalu hubbu al riyasah - dan hub al jah (cinta kekuasaan dan cinta kedudukan).[7] Disamping itu NU sebagai par- pol selalu mendapat pengawasan para pengua- sa dalam setiap kegiatan keagamaan ; maka semakin menyempitkan ruang Nahgerakl UlaNU sendiri,[8] sehingga mengalami kemacetan.

Terjadinya pergeseran orientasi dan macetnya nilai-nilai serta sikap hidup po- sitif di bidang keagamaan inilah yang menye babkan Nahdlatul Ulama kembali ke khittah - 1926. Dan karena yang pada dasarnya ia seba gai sebuah jam'iyah maka tentunya harus menjunjung tinggi disamping memperjuangkan asas-asas keagamaan. Sebab faktor inilah yang menjadi roda penggerak di tubuh Nahdlà tul Ulama.

---

[7] Ibid, hal. 124-125.

[8] Mujib Ridwan, Hasil Ceramah Konfrensi Periodik anak Cabang NU kec. Gubeng, 6 Jumadil Awwal 1405 H / 27 Januari 1985, tidak dipublikasikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.1. Faktor Politik.

Setelah Nahdlatul Ulama berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, maka tentunya aspirasi politik Nahdlatul Ulama juga lewat partai tersebut, sehingga apapun predikat yang disandangpartai persatuan pembangunan; Nahdlatul Ulama juga terlibat di dalamnya. Begitu halnya dengan anggapan bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang beroposisi kepada pemerintah , maka secara otomatis Nahdlatul Ulama yang menjadi unsur partai ini pasti dianggap juga beroposisi kepada pemerintah.[9] Dan sebagai konsekwensinya tidaklah berlebihan bila anak buah atau bagian-bagian Nahdlatul Ulama seperti Lembaga Ma'arif, Ma'arot juga menanggung akibatnya yang tidak lain berupa terlantarnya lembaga itu karena kurang terawasi. Ini sebagai akibat fusi yang dilakukan Nahdlatul Ulama.

c.1. Faktor Sosial Budaya.

Di bidang sosial Nahdlatul Ulama ikut memberikan santunan kepada orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan anak yatim. Adapun di bidang sosial budaya Nahdlatul Ulama adalah merupakan sebuah organisasi keagamaan yang dapat menerima bahkan mengembangkan kebudayaan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam bidang

---

[9] Prisma, No. Ekstra, tahun 1984, LP3ES, Jakarta, Hal. 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial budaya inilah yang akhirnya melahirkan kreasi seni yang me mpunyai ciri ter - sendiri, antara lain adanya tradisi berzanji, shalawat, hadroh dan sebagainya.[10]

Akibat tradisi tersebut tidaklah heran kalau budaya keagamaan yang tertanam di dalam masyarakat akan tumbuh dan hidup subur yang dipelihara di lingkungan masyarakat Nahdlatul Ulama.

Jadi banyak bidang sosial budaya, sebagaimana gambaran di atas itu menunjukkan wawasan keagamaan Nahdlatul Ulama yang ternyata mengejawantah (menjelma) dalam kegiatan yang berdimensi banyak. Hal ini ditangani NU, sebab ia menyadari bahwa itu semua merupakan penunjang bagi keberhasilan missi NU yang telah ditetapkan sejak awal berdirinya. Adanya tradisi dan pranata sosial yang telah membentuk modal kegiatan NU yang tersendiri.

Kesemua amalan di atas tersebut dikerjakan oleh NU sebelum ia memasuki jenjang politik, tetapi setelah NU mengangungkan politik, maka akibatnya amalan-itulbanyak yang terlalaikan ; dalam hal ini Slamet Effendy Yusuf menyebut sebagai "ladang yang terbengkelai".[11]

Jadi faktor ini juga yang menyebabkan NU untuk bertekad untuk mengembalikan

---

[10]Slamet Effendy Yusuf dkk, Op. cit, hal. 120.
[11]Ibid, hal. 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya sebagaimana semula atau yang lebih dikenal dengan kembali ke khittah 1926.

3. Tujuan.

Proses modernisasi yang kini sedang dilaku kan, merupakan upaya dasar untuk merubah dan mengembangkan bangsa ini. Konsensus nasional yang melahirkan negara berdasarkan Pancasila, menuntut semua kekuatan-kekuatan sosial yang ada di negara ini untuk saling berpacu mengisi dan membentuk masa depan bangsa dengan karakteristik kemajemu - kannya. Pluralitas, adalah kenyataan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan sosial ke agamaan, yang berada di tengah masyarakat, tentunya juga dituntut untuk menyelesaikan masalah yg ada di masyarakat demi kepentingan massanya. Dan ini berarti memerlukan tindakan-tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah tersebut yang sudah barang tentu bukan hanya sekedar memberikan konsep semata.

Dari apa yang dikemukakan di depan, maka sangat jelaslah tentang semangat kembali ke khittah 1926. Sebab semangat khittah 1926 adalah meru pakan sumber inspirasi yang sekaligus juga merupa kan cita-cita Nahdlatul Ulama yang harus digayuh. Tujuan kembali ke khittah 1926 tersebut tercantum dalam program dasar pengembangan lima tahun Nah - dlatul Ulama, antara lain ;

1. Menghayati makna seruan kembali kepada jiwa 1926.
2. Memantapkan upaya intern untuk memenuhi seruan tersebut, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memantapkan cakupan partisipasi Nahdlatul Ulama secara lebih nyata dalam pembangunan bangsa.[12]

3.1.1. Menghayati makna seruan kembali kepada jiwa 1926.

Yang dimaksud dengan menghayati makna seruan kembali kepada jiwa 1926. Ini berarti Nahdlatul Ulama akan mengembalikan pola kepemimpinannya kepada kekuasaan atau supremasi ulama, sebab sebagai jam'iyah diniyah mau tidak mau Nahdlatul Ulama memerlukan kharisma ulama yang berfungsi sebagai pemandu atau pemimpin serta pengawas program-programnya dengan tanpa mematikan inisiatif para jama'ahnya sendiri, karena asas musyawarah, soliderites dan keikhlasan ditegakkan.

3.2.1. Memantapkan upaya intern untuk memenuhi seruan tersebut.

Yang dimaksud dengan memantapkan upaya intern adalah memantapkan dalam diri NU sendiri dalam menghayati makna khittah. Oleh karena itu upaya pemantapan internal haruslah terlebih dahulu dituangkan dalam bentuk rencana dan pelaksanaan kerja baik itu pelaksanaan kerja institusional maupun operasional terutama di bidang pembangunan umat. Dengan demikian maka secara otomatis pada akhirnya akan mengimbas pada keharusan NU untuk mengembangkan internnya sendiri, seperti sumbangsih NU dalam mengatasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Kesemua upaya membangun itu dalam

[12]PBNU, Loc cit, hal. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya mengandung keharusan NU untuk mengembangkan dalam lingkungan intern sendiri. Sebab upaya tersebut akan menumbuhkan suasana kekeluargaan, keikhlasan dan saling pengertian yang kesemuanya menjadi manifestasi penghayatan jiwa kehidupan NU di tahun 1926.

3.3.1. Memantapkan cakupan partisipasi NU secara lebih nyata dalam pembangunan bangsa.

Yang dimaksud dengan tujuan terakhir ini adalah memahami terlebih dahulu akan hakekat sebenarnya dari pembangunan. Karena pembangunan adalah sebagai proses perbaikan kehidupan. Maka NU berkeharusan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pembangunan bangsa, baik itu di bidang materiil maupun spirituil.

C. Konsekwensi.

Kembali ke khittah 1926 berarti akan membawa beberapa konsekwensi logis dalam pembenahan tata laksana organisasi Nahdlatul Ulama. Konsekwensi ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Konsekwensi Intern.
2. Konsekwensi Extern.

Konsekwensi Intern antara lain :

a. Setelah Nahdlatul Ulama kembali ke khittah 1926,maka warga NU secara pererangan diberi kebebasan berpolitik praktis dan menyalurkan aspirasinya melalui salah satu dari tiga kontestan yang disukainya.
b. Setelah Nahdlatul Ulama kembali kemkhittah 1926,maka warga NU dan bagian-bagiannya seperti Lembaga Ma'arif dan Mabarot harus ikut mensukseskan program yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dicanangkan pemerintah,misalnya: masalah keluarga berencana, masalah transmigrasi dan masalah-masalah pendidikan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Konsekwensi Ekstern antara lain:

a. Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah 1926, maka ini berarti menunjukkan kepada dunia luar bahwa Nahdlatul Ulama mulai saat itu sudah tidak lagi terikat oleh atau dengan organisasi sosial-politik maupun keagamaan yang ada, sehingga tampak kemandiriannya.
b. Karena kemandiriannya tersebut, maka Nahdlatul Ulama bebas menentukan aspirasinya sendiri dengan tanpa tergantung kepada organisasi politik yang ada. Dengan demikian Nahdlatul Ulama harus bersikap netral terhadap semua organisasi, sehingga bukan lagi sebagai pendukung utama dari salah satu organisasi politik tertentu.

Demikianlah konsekwensi logis Nahdlatul Ulama setelah kembali ke khittah 1926.

-oOo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id